

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah suatu negara berkembang yang memiliki wilayah yang besar sehingga memiliki jumlah populasi penduduk terbesar ke empat di dunia. Negara dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman terutama dalam perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu luas. Berbagai macam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya di bidang bisnis, ekonomi dan perbankan tetapi perkembangan sudah semakin luas pada bidang lainnya, seperti bidang pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan, serta masih banyak lagi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, aktivitas penyampaian informasi menjadi bagian yang sangat vital. Melalui informasi yang dikelola secara cepat dan akurat, publik akan memahami bahkan memberikan dukungan ketika suatu kebijakan pembangunan digulirkan. Demikian pula sebaliknya, jika informasi yang disampaikan tidak dipahami dan kurang transparan, kekhawatiran akan timbulnya keresahan dari masyarakat. Pemerintah sangat menyadari hal ini, karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan sistem informasi berbasis elektronik atau bisa disebut dengan istilah *E-Government*.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dikenal dengan *Electronic Government (E-Government)*. Pada Inpres Nomor

3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan juga di junjung tinggi oleh pendoman terkait seperti Peraturan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang kebocoran data Publik, serta Undang-Undang No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan data Terbuka. merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Kebijakan penerapan atau implementasi *E-Government* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi.

Dengan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan

menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pemerintah dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui manajemen perubahan menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 15 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang tugas,

fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 3, disebutkan bahwa Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1
Website Kesbangpol



Sumber : Kesbangpol Provinsi Kalbar 2023

Wujud nyata dari aplikasi E-Government yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satunya dengan membangun situs resmi www.kesbangpol.kalbarprov.go.id. Website badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat merupakan tahapan pertama dalam penerapan *E-Government* yang dibuat pada tahun 2021 yang memiliki sasaran agar masyarakat indoenisa kususnya Provinsi Kaliasmntan Barat dengan mudah memperoleh akses beragam topik dan informasi tentang layanan pemerintah daerah kususnya tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, serta Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di indoensia dengan menggunakan media internet.

Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat penerapan *E-Government* sudah terlaksana akan tetapi tidak efektif dan efisien karena masih banyak kelemahan dalam penerapan *E-Governmnet*. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terdapat berbagai macam fenomena pada kelemahan untuk menerapkan *E-Government* yaitu, kurangnya Sumber Daya Manusia bidang teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, dilihat dari jenjang Pendidikan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Data Tabel 1.1. menunjukkan bahwa masih banyak yang tingkat Pendidikannya dibawah Sarjana bahkan ada yang hanya Lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), padahal Sumber Daya Manusia memiliki peran yang paling penting dalam Penerapan *E-Governmnet* sehingga menyebabkan penerapan *E-Government* tidak berjalan secara maksimal. Berikut tabel data tingkat Pendiikan Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1.1

Data Tingkat Pendidikan Pegawai Kesbangpol

Pendidikan	Jumlah
S2	10
S1	11
D3	2
SMA	14
SMP	1
Total	38

Sumber : Kesbangpol Provinsi Kalbar 2023

Kemudian terbaatasnya anggaran dana dalam Penerapan *E-Government* di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah total anggaran dana Rp. 149.940.925,00 dengan jumlah ini masih sangat terbatas anggaran dana dan sangat berpengaruh sehingga penerapan *E-Governemnet* masih belum berjalan secara Maksimal. Berikut merupakan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan barat :

Tabel 1.2

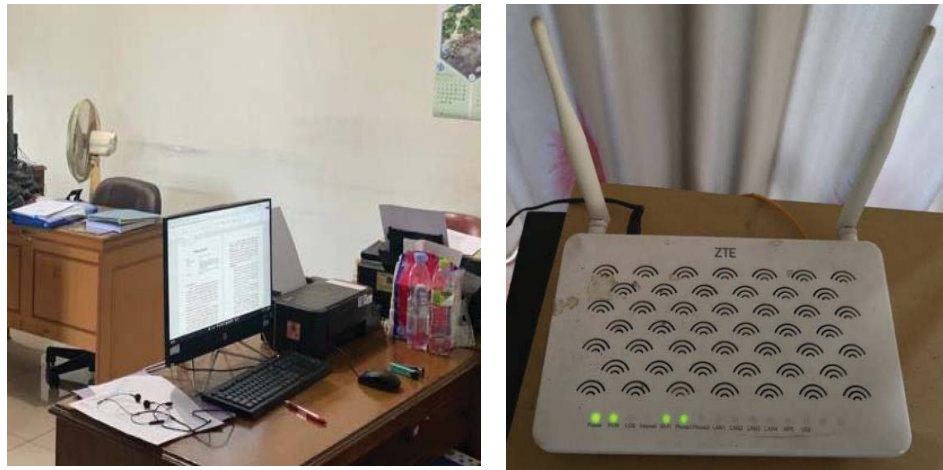
Anggaran Pelaksanaan Teknologi Informasi Kesbangpol

PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI KESBANGPOL	
Belanja Oprasi	Rp.9.101.200,00
Belanja barang dan jasa	Rp.11.208.125,00
Belanja pemeliharaan peralatan komputer	Rp.8.400.000,00
Belanja unit Komputer	Rp.60.000.000,00
Total	Rp.88.709.325,00

Sumber : Laporan Anggaran Dana Kesbangpol Tahun 2022

Kemudian Tidak memadainya infrastruktur yang tersedia yaitu pada sarana dan prasarana, seperti jaringan internet dengan kecepatan hanya 20 Mbps yang digunakan, masih kurang serta lambat dan jumlah komputer yang masih terbatas yaitu setiap bidang atau ruangan di badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat hanya mempunyai 2 unit Komputer. Berikut merupakan foto komputer di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat:

Gambar 1.2
Infrastruktur yang masih Kurang



Sumber : Kesbangpol Provinsi Kalbar 2023

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh Bagaimana penerapan *E-Government* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Penerapan *E-Government* Indonesia (PeGI) yaitu suatu dimensi kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, dan perencanaan. Dimensi tersebut telah digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menilai efektivitas penerapan *E-Government* pada level kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan gambaran masalah yang telah di paparkan merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga benar atau tidaknya

dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan melakukan suatu penelitian yang mengutamakan prinsip, aturan, dan kaidah ilmiah agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan memahami bahwa bagaimanakah kuantitas, kualitas, efektifitas biaya, ketetapan waktu, serta tugas kerja dari sumber daya manusia. Berdasarkan pertimbangan hal di atas, maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bentuk atau pola penerapan *E-Government* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Demikian penulis mengangkat judul penelitian terkait **“PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia bidang teknologi informasi.
2. Terbatasnya anggaran Dana dalam penerapan *E-Government*.
3. Tidak memadainya infrastruktur yang tersedia yaitu pada sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang sering gangguan dan jumlah komputer yang terbatas.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi permasalahan penelitian, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana Penerapan *E-Government* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *E-Government* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk media pengembangan Teori pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan dalam Lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, terutama yang berkaitan dengan penerapan *E-Government*.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, dapat menjadi masukan serta menambah pengetahuan untuk memaksimalkan penerapan *E-Government*.
2. Bagi Masyarakat, mendapatkan Pengetahuan tentang Penerapan *E-Government* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peneliti lain, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi jika ingin melakukan penelitian sejenis di waktu mendatang khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan.